



# LAPORAN

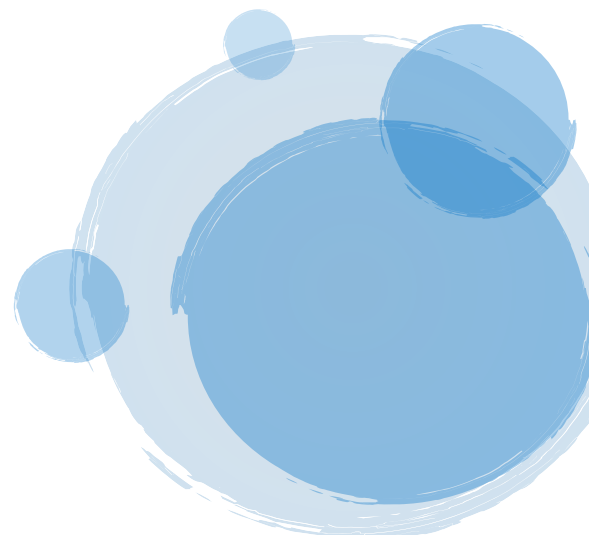
## PELAYANAN

## PENGADUAN MASYARAKAT

PERIODE TAHUN 2020

**PUSAT INFORMASI & KOMUNIKASI  
SUB BAGIAN HUMAS & TATA USAHA KEPALA PERWAKILAN**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



# **LAPORAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020**

Salah satu kegiatan Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah menerima dan memberikan layanan terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan yang masuk dari masyarakat merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK. Opini publik pun dapat terjadi dari hal tersebut, bagaimana BPK menanganinya dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akan dinilai oleh pihak-pihak di luar BPK.

Pengaduan dari masyarakat mengindikasikan bahwa BPK menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabilitas dan transparan yang bersih, bebas dari KKN. Pengaduan ini bisa disampaikan secara langsung, email/surat maupun melalui website. Isi dari pada pengaduan masyarakat ini bermacam-macam, dimana mayoritas menghendaki agar segala bentuk kecurangan yang terjadi yang menyangkut pengelolaan keuangan negara harus dibenahi.

Tujuan dari laporan ini adalah mendapatkan masukan dan informasi tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat serta untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK, terutama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel.

**RESUME ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT  
DI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2020**

No	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	<b>Saluran</b>	Jumlah : 7
	a) Website	: -
	b) Surat/Email/Telepon	: 7
	c) Langsung	: -
2.	<b>Leading Topik</b>	
	Pengaduan Masyarakat	: 1. Pengaduan Sengketa Lahan dan penyalangunaan aset negara 2. Lain - lain
3.	<b>Topik yang perlu mendapat perhatian</b>	
	Pengaduan Masyarakat	: 1. Permasalahan Pelarangan Perumahan Korpri untuk dijadikan hak milik oleh para PNS/Pensiunan yang menghuninya dilarang oleh BPK karena tanah tersebut milik Pemkot. 2. Informasi penyimpangan kegiatan sosialisasi pemasangan rambu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) pada Oktober 2019 di Kab. Kutai Barat 3. Penyimpangan pada Kantor Penghubung Kalimantan Timur 4. Terjadi banyak kegiatan pokir anggota dewan yang dipakai untuk “perjalanan dinas” mengatasnamakan bimtek dan tidak jelas output dan pengadaan videotron di RSUD Bontang yang harganya tidak wajar 5. Belanja bantuan sosial dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan keadaan riil. 6. Indikasi penggelapan dan penipuan, pemilik tanah Anius Nyata dan Keuangan perusahaan PT. Borneo Citra Persada Mandiri akibat jual beli tanah berkedok warisan serta PT. Borneo Citra melanggar Perda Kab. Kutai Barat No. 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah dan Tanah Tumbuh dalam wilayah Kab. Kutai Barat 7. Indikasi dugaan perizinan Hak Guna Usaha Perkebunan PT. Borneo Citra Persada Mandiri yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

## **I. SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Pengaduan masyarakat yang berasal dari publik eksternal BPK dapat disalurkan melalui beberapa saluran pengaduan yakni website, surat/e-mail/telepon, ataupun datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur) yang beralamat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin No.19 Samarinda.

Pada tahun 2020, analisis kuantitatif pengaduan masyarakat di BPK melalui saluran website, surat/email/telepon, maupun datang langsung adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Persentase Saluran Pengaduan Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Saluran</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Website	0	0%
2	Surat/Email/Telepon	6	85,71%
3	Langsung	1	14,29%
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) pengaduan masyarakat yang ke BPK Perwakilan Kalimantan Timur selama tahun 2020.

## **II. TOPIK PENGADUAN MASYARAKAT**

Pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan ke dalam topik pengaduan yang terkait dengan pemeriksaan yaitu permohonan pemeriksaan, informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah dan laporan hasil pemeriksaan, serta pengaduan yang terkait dengan non pemeriksaan yaitu kepegawaian/SDM, informasi BPK yang dipublikasikan, dan lain-lain.

Selama tahun 2020 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk diklasifikasikan berdasarkan topik sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Persentase Topik Pengaduan Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Topik</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
	<b>Pemeriksaan</b>		
1	Permohonan Pemeriksaan	0	0%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	5	71,43%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	0	0%
	<b>Non Pemeriksaan</b>		
4	Kepegawaian/ SDM	0	0%
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	0	0%
6	Lain-lain	2	28,27%
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

Periode tahun 2020 terdapat 5 (lima) buah pengaduan yang masuk ke dalam topik informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara, dan 2 (dua) buah masuk ke dalam topik lain – lain (permasalahan sengketa lahan).

### **III. TANGGAPAN TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT**

Pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2020 telah diteruskan ke Sub bagian hukum untuk ditelaah lebih mendalam.

Adapun analisis kuantitatif pengaduan masyarakat yang ditanggapi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat**

No	Topik	Jml	Yang Ditanggapi Oleh Subbag Hukum	Yang Diteruskan Ke Satker	Trash
	<b>Pemeriksaan</b>				
1	Permohonan Pemeriksaan	0	0	0	0
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	5	0	3	2
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	0	0	0	0
	<b>Non Pemeriksaan</b>				
4	Kepegawaian/ SDM	0	0	0	0
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	0	0	0	0
6	Lain-lain	2	1	1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

### **IV. TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksaan LKPD.

Demikian Laporan Pengaduan Masyarakat ini dibuat dengan harapan hasil laporan ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

Samarinda, 2 Januari 2021  
Kasubag Humas dan TU Kalan



**Surya Satya Darma**  
**NIP 198008132008081001**